

dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern diwujudkan melalui penerapan transformasi digital pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah, salah satunya melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. SAKTI merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan pada satuan kerja pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam satu basis data (*single database*) yang terintegrasi. Penerapan SAKTI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023. Melalui implementasi tersebut, pemerintah mendorong digitalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis keuangan yang sebelumnya dikelola menggunakan aplikasi yang terpisah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa implementasi SAKTI telah diterapkan pada ribuan satuan kerja kementerian/lembaga sehingga proses administrasi keuangan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu proses bisnis yang terdampak oleh implementasi SAKTI adalah pengelolaan belanja pegawai, termasuk proses penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui integrasi dengan data kepegawaian, aplikasi Gaji Pegawai Pemerintah (GPP), serta sistem absensi,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara melalui modernisasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah belanja pegawai, yang merupakan bentuk pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses penggajian harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kepada pegawai yang berhak agar tidak hanya menjamin terpenuhinya hak pegawai, tetapi juga mendukung akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam mengelola suatu organisasi. Selanjutnya, Romney dan Steinbart (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data transaksi menjadi informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat pengendalian intern. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi penggajian yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan informasi penggajian yang akurat, andal, tepat waktu,

proses penggajian diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, meminimalkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan ketepatan pembayaran hak pegawai. Namun demikian, penerapan sistem yang terintegrasi belum sepenuhnya menjamin ketepatan penggajian apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai pada setiap tahapan proses penggajian. Oleh karena itu, selain transformasi digital melalui implementasi SAKTI, efektivitas sistem pengendalian intern juga menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya proses penggajian yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), pemerintah juga memanfaatkan Web Gaji sebagai aplikasi yang digunakan dalam proses pengelolaan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Web Gaji merupakan sistem informasi yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mengelola data penggajian pegawai secara terintegrasi, mulai dari pembaruan data pegawai, penginputan komponen gaji, perhitungan hak pegawai, hingga penyusunan daftar gaji yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses pembayaran melalui sistem perbendaharaan negara. Penggunaan Web Gaji bertujuan meningkatkan akurasi perhitungan gaji, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi apabila pengolahan data dilakukan secara manual.

Dalam pelaksanaannya, Web Gaji tidak bekerja secara terpisah, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah lainnya, seperti SAKTI, data kepegawaian, serta informasi kehadiran pegawai. Integrasi tersebut memungkinkan proses penggajian dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel karena setiap perubahan data pegawai, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan status keluarga, mutasi, maupun perubahan tunjangan, harus diperbarui terlebih dahulu sebelum proses

penyusunan daftar gaji dilakukan. Dengan demikian, kualitas data yang diinput ke dalam Web Gaji menjadi faktor penting dalam menghasilkan informasi penggajian yang akurat.

Pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, proses penggajian pegawai telah memanfaatkan aplikasi Web Gaji sebagai sarana pengelolaan administrasi pembayaran gaji, sedangkan proses pencairan belanja pegawai dan pelaporan dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Penggunaan kedua aplikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Meskipun demikian, keberhasilan proses penggajian tidak hanya bergantung pada penggunaan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi penggajian yang memadai serta sistem pengendalian intern yang efektif dalam setiap tahapan proses penggajian. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai telah dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kepada penerima yang berhak, serta didukung oleh administrasi yang tertib dan akuntabel.

Meskipun pemerintah telah melakukan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara melalui implementasi berbagai sistem informasi yang terintegrasi, efektivitas pengelolaan keuangan tetap dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pada setiap satuan kerja. Hal tersebut tercermin dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan terdapat 1.004 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dari jumlah tersebut, 482 permasalahan (48%) merupakan kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, di samping kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan serta struktur pengendalian intern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah, meskipun proses pengelolaan keuangan telah didukung oleh sistem yang semakin terdigitalisasi. Kelemahan pengendalian intern berpotensi memengaruhi keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap prosedur, serta ketepatan pelaksanaan berbagai proses bisnis, termasuk pengelolaan belanja pegawai dan proses penggajian ASN. Oleh karena itu, selain didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, setiap instansi pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif agar proses penggajian dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko kesalahan apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi, khususnya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam sistem akuntansi penggajian, pengendalian intern diwujudkan melalui pemisahan fungsi yang jelas antarbagian, pemberian otorisasi atas

setiap transaksi, pelaksanaan verifikasi terhadap data kepegawaian dan dokumen pendukung, rekonsiliasi data sebelum pembayaran, serta monitoring secara berkelanjutan terhadap seluruh proses penggajian. Mulyadi (2016) menegaskan bahwa pemisahan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur otorisasi yang memadai, praktik kerja yang sehat, serta pegawai yang kompeten merupakan unsur pokok sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern yang efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung sistem akuntansi penggajian agar mampu menghasilkan proses penggajian yang akurat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia juga melaksanakan proses penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Proses penggajian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengelolaan data kepegawaian, pencatatan kehadiran, penyusunan daftar gaji, verifikasi dokumen, proses otorisasi, hingga pembayaran gaji kepada pegawai. Setiap tahapan tersebut melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi yang baik agar proses penggajian dapat berjalan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, proses penggajian di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang melibatkan Pengelola Kepegawaian, Operator Absensi, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran. Keterlibatan beberapa pihak tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi dalam proses penggajian yang memerlukan koordinasi, komunikasi, serta pengendalian yang efektif untuk menjaga keakuratan data dan

ketepatan pembayaran gaji. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada tanggal 4 Mei 2026, diperoleh informasi bahwa setiap terjadi perubahan data kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, perubahan golongan, perubahan status keluarga, mutasi, maupun perubahan hak atas tunjangan, data penggajian harus segera diperbarui sebelum penyusunan daftar gaji dilakukan agar pembayaran hak pegawai tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penggajian tidak hanya bergantung pada penggunaan aplikasi penggajian, tetapi juga dipengaruhi oleh keakuratan data kepegawaian, ketepatan waktu pembaruan data, efektivitas koordinasi antarbagian, kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pada setiap tahapan proses penggajian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.

Penelitian mengenai sistem akuntansi penggajian telah banyak dilakukan pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa Wahab, Arnadi Cahirunnas, dan Nichen Nichen (2025) menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai negeri sipil telah menggunakan sistem digital yang terintegrasi, sedangkan penggajian pegawai honorer masih dilakukan secara manual sehingga masih berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, dan rendahnya transparansi pengelolaan gaji. Selanjutnya, penelitian Munadi Agri Saswan dan Sri Wahyuni (2025) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian telah berjalan sesuai teori melalui adanya pemisahan fungsi, prosedur yang terstruktur, serta kelengkapan dokumen pendukung sehingga mampu meningkatkan akurasi dan transparansi proses

penggajian. Penelitian Wimpi Srihandoko, Rika Maulida, dan Anton Widio Pratomo (2024) juga menunjukkan bahwa sistem penggajian yang didukung oleh kelengkapan dokumen serta penerapan pengendalian intern mampu meminimalkan kesalahan dalam proses pembayaran gaji.

Penelitian lain lebih menitikberatkan pada penerapan sistem informasi penggajian berbasis teknologi. Diana Suksesiwy Lubis dkk. (2024) membuktikan bahwa sistem payroll berbasis komputer mampu meningkatkan efisiensi proses penggajian, mengurangi kesalahan perhitungan, serta mempercepat pembayaran gaji. Penelitian Nella Ayu Shintya dan Riza Dessy Nila Ayuntika (2024) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPD mampu mendukung proses penggajian yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih terdapat kendala teknis pada proses penginputan data. Sementara itu, penelitian Wahyuni (2024) menemukan bahwa sistem akuntansi penggajian yang masih dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan pembayaran, kesalahan perhitungan, serta lemahnya pengendalian dalam proses penggajian.

Penelitian Hesty Andriyaningsih dan Layon Hocben Hutagaol (2023), Delfy Yandri dan Ayu Fitri Rosianie (2021), Amirah Yayang Intishar dan Muanas (2018), serta Harry Roestiono dkk. (2016) menegaskan bahwa sistem akuntansi penggajian yang didukung pengendalian intern yang memadai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penggajian melalui pemisahan fungsi, prosedur yang jelas, otorisasi, serta kelengkapan dokumen sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan dalam proses pembayaran gaji.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada penerapan sistem akuntansi penggajian, sistem informasi

penggajian, implementasi aplikasi payroll, maupun efektivitas pengendalian intern secara terpisah. Penelitian yang mengkaji keterkaitan antara sistem akuntansi penggajian, sistem pengendalian intern, dan ketepatan penggajian pegawai dalam satu penelitian masih relatif terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji ketiga aspek tersebut pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, yang dalam pelaksanaan penggajiannya telah memanfaatkan aplikasi Web Gaji dan SAKTI serta melibatkan berbagai pihak dalam setiap tahapan proses penggajian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern memiliki peranan penting dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Mendukung Ketepatan Penggajian Pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang."

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa ketepatan penggajian pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern. Meskipun pemerintah telah melakukan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern pada pengelolaan keuangan pemerintah. Di sisi lain, proses penggajian pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang melibatkan berbagai pihak dan tahapan yang memerlukan koordinasi, keakuratan data, serta pengendalian intern yang memadai agar pembayaran gaji dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kepada pegawai yang berhak. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu masih terdapat kesenjangan penelitian, baik dari sisi objek, variabel, maupun metode penelitian, khususnya penelitian yang mengkaji sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern dalam kaitannya dengan ketepatan penggajian pegawai pada instansi penegak hukum. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi penggajian pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam proses penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang?
3. Bagaimana sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern mendukung ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi penggajian pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern dalam proses penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.
3. Untuk menganalisis bagaimana sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern mendukung ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern dalam mendukung ketepatan penggajian pegawai pada instansi pemerintah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji sistem akuntansi penggajian, sistem pengendalian intern, dan

ketepatan penggajian, terutama pada instansi penegak hukum atau organisasi sektor publik yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan serupa.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai implementasi sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan penggajian pada satuan kerja pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi penggajian dan sistem pengendalian intern, serta memberikan masukan dalam meningkatkan koordinasi antarbagian, ketepatan pembaruan data kepegawaian, dan pelaksanaan prosedur pengendalian sehingga proses penggajian pegawai dapat berjalan lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Bagi Universitas Dharma Andalas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi ilmiah di lingkungan Universitas Dharma Andalas, khususnya pada Program Studi Akuntansi, serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang sistem akuntansi, akuntansi sektor publik, dan sistem pengendalian intern.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian sejenis, baik melalui perluasan objek penelitian, penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda, maupun pengembangan

variabel lain yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian, sistem pengendalian intern, dan ketepatan penggajian pegawai pada instansi pemerintah.